

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Hakikat Pembelajaran PPKn di SMP**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang strategis dan fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga mampu bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PPKn berfungsi sebagai wahana pendidikan nilai, moral, dan keterampilan kewarganegaraan yang mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ramadhona, 2023). Dengan posisi strategis tersebut, PPKn tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mata pelajaran yang mentransmisikan pengetahuan tentang negara, melainkan sebagai sarana utama pembentukan karakter kebangsaan dan identitas nasional peserta didik.

Secara pedagogis, pembelajaran PPKn di SMP berada pada fase penting perkembangan kognitif dan sosial siswa. Pada tahap ini, siswa mulai mampu berpikir abstrak, memahami hubungan sebab-akibat, serta menunjukkan minat terhadap isu-isu sosial di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn perlu dirancang secara kontekstual, partisipatif, dan berpusat pada siswa agar mampu mengembangkan potensi berpikir kritis serta kesadaran demokratis sejak dini.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan mata pelajaran yang berfungsi membentuk siswa menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, demokratis,

serta memiliki kesadaran hukum dan kebangsaan. Pembelajaran PPKn tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga pengembangan keterampilan serta pembentukan sikap dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis, PPKn berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi rujukan utama dalam perumusan tujuan, materi, serta proses pembelajaran PPKn. PPKn memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya konsep abstrak, tetapi pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn diharapkan mampu mengantarkan peserta didik untuk memahami makna nilai Pancasila secara mendalam sekaligus menginternalisasikannya dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Dari perspektif yuridis, keberadaan PPKn sebagai mata pelajaran wajib memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi tersebut sejalan dengan misi PPKn yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang berakarakter, bermoral, dan memiliki kesadaran konstitusional. Dengan demikian, PPKn menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan kebijakan pendidikan terkini, PPKn tetap menempati posisi sentral dalam kurikulum nasional. Baik dalam Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, PPKn diposisikan sebagai mata pelajaran yang berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi kewarganegaraan siswa.

Kurikulum Merdeka secara khusus menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, serta bermakna, sehingga pembelajaran PPKn tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengalaman belajar yang memungkinkan siswa membangun pemahaman melalui keterlibatan aktif.

PPKn memiliki cakupan materi yang luas, meliputi nilai-nilai Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, demokrasi, serta keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Cakupan materi tersebut menunjukkan bahwa PPKn berkaitan langsung dengan realitas kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn idealnya dirancang dengan pendekatan yang mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata agar siswa mampu memahami relevansi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari.

Sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan warga negara, PPKn tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, aspek afektif berkaitan dengan pembentukan sikap dan nilai, sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ketiga aspek tersebut harus dikembangkan secara seimbang agar siswa tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan hal yang benar.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan yang dihadapi peserta didik semakin kompleks. Arus informasi yang begitu deras menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu menyaring informasi secara bijak serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. PPKn memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan kemampuan tersebut melalui pembelajaran yang menekankan analisis, evaluasi, dan refleksi terhadap berbagai fenomena sosial dan politik.

Keberadaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam kurikulum nasional memiliki landasan yuridis yang kuat dan jelas.

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan fungsi pendidikan nasional tersebut mengandung makna bahwa proses pendidikan di Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Dalam konteks inilah, PPKn memiliki posisi strategis karena secara langsung mengemban misi pembentukan watak dan karakter kebangsaan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Frasa “warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” menunjukkan secara tegas bahwa pendidikan di Indonesia harus menghasilkan individu yang memiliki kesadaran kewarganegaraan. PPKn sebagai mata pelajaran yang secara khusus memuat materi tentang nilai-nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam perkembangan kebijakan pendidikan terkini, pemerintah terus melakukan penyempurnaan kurikulum agar lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan siswa. Salah satu kebijakan terbaru adalah diterbitkannya Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum Nasional. Peraturan ini memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum 2013 atau Kurikulum Merdeka sesuai dengan tingkat kesiapan dan karakteristik sekolah. Meskipun terdapat pilihan dalam implementasi kurikulum, substansi utama pembelajaran tetap diarahkan pada penguatan karakter, internalisasi nilai-

nilai Pancasila, serta pengembangan kompetensi siswa secara holistik.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa penguatan karakter bukan sekadar program tambahan, melainkan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, termasuk PPKn. PPKn diposisikan sebagai mata pelajaran kunci dalam membangun Profil Pelajar Pancasila yang mencakup dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dengan demikian, PPKn tidak hanya berfungsi sebagai penyampai konten akademik, tetapi juga sebagai wahana utama pembentukan profil siswa sesuai dengan arah pembangunan karakter bangsa.

Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran PPKn dirancang untuk mendorong peserta didik aktif mengeksplorasi isu-isu kewarganegaraan melalui pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya secara optimal. PPKn dalam kerangka ini tidak lagi bersifat indoktrinatif, melainkan dialogis dan reflektif, sehingga siswa didorong untuk membangun pemahamannya sendiri tentang nilai-nilai Pancasila dan demokrasi.

Sementara itu, dalam Kurikulum 2013, PPKn juga menekankan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini bertujuan melatih siswa berpikir kritis dan sistematis dalam memahami materi PPKn. Dengan demikian, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka sama-sama menempatkan PPKn sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan secara terpadu.

Landasan yuridis yang kuat tersebut menunjukkan bahwa PPKn memiliki legitimasi yang kokoh dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaan PPKn bukan sekadar tradisi kurikulum, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka menjaga keberlangsungan nilai-nilai

Pancasila dan identitas nasional di tengah arus globalisasi. Tanpa penguatan PPKn, siswa berpotensi kehilangan orientasi nilai dan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, serta bermakna melalui pengalaman belajar yang nyata. Dalam konteks PPKn, pendekatan ini mendorong siswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mengalaminya secara langsung melalui diskusi, refleksi, dan keterlibatan dalam pemecahan masalah sosial. Dengan demikian, PPKn diposisikan sebagai mata pelajaran yang berperan penting dalam membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, dan berkarakter (Triaswari et al., 2025).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan PPKn dalam kurikulum nasional memiliki dasar hukum yang kokoh sekaligus relevansi yang tinggi dengan tujuan pendidikan nasional. PPKn berperan sebagai mata pelajaran inti dalam membentuk warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila, demokratis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pembelajaran PPKn menjadi keniscayaan agar amanat yuridis tersebut dapat terwujud secara nyata dalam praktik pendidikan di sekolah.

Selain itu, PPKn juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran demokratis siswa. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai cara hidup yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Melalui pembelajaran PPKn, siswa diarahkan untuk memahami pentingnya menghargai perbedaan pendapat, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil bersama. Dengan demikian, PPKn menjadi wahana pendidikan demokrasi yang sangat penting di lingkungan sekolah.

Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa berada pada fase perkembangan remaja awal yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir abstrak serta kebutuhan untuk diakui dalam

lingkungan sosial. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembelajaran PPKn. Di satu sisi, siswa sudah mulai mampu memahami konsep-konsep abstrak seperti keadilan, hak, dan tanggung jawab. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan bimbingan agar mampu menyalurkan kemampuan berpikir tersebut secara positif. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn di SMP perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu memfasilitasi perkembangan kognitif dan sosial siswa secara optimal.

Pembelajaran PPKn diharapkan mampu menjadi wahana strategis untuk membentuk siswa yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, berpikir kritis, serta bersikap demokratis. Lingkungan sosial dan budaya sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kontekstual untuk memperkaya pembelajaran PPKn. Isu-isu lokal, peristiwa sosial, serta pengalaman nyata siswa dapat dijadikan bahan diskusi dan refleksi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Secara konseptual, PPKn dirancang untuk mengembangkan tiga dimensi utama kompetensi kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh dalam membangun profil warga negara yang ideal. Ruskialan et al. (2024) menegaskan bahwa pembelajaran PPKn yang efektif harus mampu mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara seimbang agar siswa tidak hanya mengetahui konsep kewarganegaraan, tetapi juga terampil menerapkannya dan memiliki sikap kewarganegaraan yang kuat.

1. *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan)

*Civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan merupakan dimensi fundamental dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap konsep, prinsip, dan sistem yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic knowledge* mencakup pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan, sistem hukum, hak dan

kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi dan kebhinekaan. Pengetahuan ini menjadi landasan awal bagi peserta didik untuk mengenali identitas dirinya sebagai warga negara Indonesia sekaligus memahami posisi, peran, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara teoretis, *civic knowledge* dipandang sebagai fondasi utama dalam pembentukan kompetensi kewarganegaraan secara utuh. Siswa yang memiliki pemahaman kewarganegaraan yang baik akan lebih mampu menafsirkan berbagai fenomena sosial, politik, dan hukum secara rasional, objektif, dan kritis. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan kewarganegaraan dapat menyebabkan peserta didik sulit memahami isu-isu publik, mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru, serta cenderung bersikap apatis terhadap persoalan kebangsaan. Dengan demikian, *civic knowledge* tidak hanya berfungsi sebagai bekal kognitif, tetapi juga sebagai prasyarat berkembangnya keterampilan berpikir kritis dan sikap kewarganegaraan yang positif.

Dalam konteks pendidikan abad ke-21, penguasaan *civic knowledge* tidak lagi cukup jika hanya bersifat deklaratif atau berbasis hafalan. Siswa perlu dibekali pemahaman konseptual yang mendalam serta kemampuan mengaitkan konsep kewarganegaraan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penguasaan *civic knowledge* di tingkat SMP masih memerlukan penguatan, terutama dalam menghubungkan konsep-konsep kewarganegaraan dengan situasi konkret yang dihadapi siswa di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Ruskialan et al., 2024).

Oleh karena itu, pembelajaran PPKn dituntut untuk menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual, sehingga siswa tidak hanya mengetahui “apa” suatu konsep, tetapi juga memahami “mengapa” dan “bagaimana” konsep tersebut diterapkan.

Penguatan *civic knowledge* juga berkaitan erat dengan kemampuan peserta didik dalam memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

negara dan ideologi bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial perlu dipahami secara utuh sebagai satu kesatuan sistem nilai yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini menjadi penting agar peserta didik tidak memandang Pancasila sekadar sebagai teks atau simbol, melainkan sebagai pedoman hidup yang relevan dengan berbagai persoalan sosial yang mereka temui. Dengan pemahaman yang baik, peserta didik diharapkan mampu menilai suatu peristiwa atau masalah berdasarkan perspektif nilai Pancasila.

Dalam praktik pembelajaran PPKn di sekolah, *civic knowledge* sering kali masih disampaikan melalui pendekatan yang bersifat informatif dan satu arah. Materi disajikan dalam bentuk penjelasan guru dan buku teks, sementara siswa berperan sebagai penerima informasi. Pola pembelajaran seperti ini berpotensi membuat peserta didik hanya menguasai pengetahuan pada tingkat mengingat (*remembering*) dan memahami (*understanding*), namun belum mencapai kemampuan menganalisis (*analyzing*) dan mengevaluasi (*evaluating*). Padahal, tujuan utama pengembangan *civic knowledge* adalah membekali peserta didik dengan pemahaman yang bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil sikap serta keputusan sebagai warga negara.

Penguatan *civic knowledge* menjadi sangat relevan mengingat hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam mengaitkan materi PPKn dengan realitas kehidupan mereka. Siswa cenderung memahami konsep kewarganegaraan secara tekstual, namun belum mampu menjelaskan penerapannya dalam situasi nyata, seperti dalam praktik musyawarah di kelas, sikap menghargai perbedaan pendapat, atau partisipasi dalam kegiatan sekolah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembelajaran PPKn perlu diarahkan pada penguatan pemahaman konseptual yang kontekstual dan aplikatif.

Oleh karena itu, pembelajaran PPKn perlu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa membangun sendiri pemahamannya tentang konsep kewarganegaraan melalui eksplorasi masalah, diskusi, dan refleksi. Dengan pendekatan tersebut, *civic knowledge* tidak hanya menjadi pengetahuan yang dihafal, tetapi berkembang menjadi pemahaman yang bermakna dan menjadi dasar bagi tumbuhnya keterampilan berpikir kritis serta kesadaran demokratis siswa.

## 2. *Civic Skills* (Keterampilan Kewarganegaraan)

*Civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan merupakan dimensi penting dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan kewarganegaraan dalam tindakan nyata. Jika *civic knowledge* menekankan pada apa yang diketahui siswa tentang kewarganegaraan, maka *civic skills* menekankan pada apa yang mampu dilakukan peserta didik sebagai warga negara. *Civic skills* mencakup keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpartisipasi, serta keterampilan memecahkan masalah sosial dan kewarganegaraan.

Secara teoretis, *civic skills* dipandang sebagai jembatan antara pengetahuan dan sikap kewarganegaraan. Siswa yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik tetapi tidak disertai keterampilan yang memadai akan kesulitan untuk mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, pengembangan *civic skills* menjadi aspek esensial dalam pembelajaran PPKn agar siswa mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Salah satu komponen utama *civic skills* adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini meliputi kemampuan menganalisis permasalahan, mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta merumuskan solusi secara rasional. Dalam konteks kewarganegaraan, berpikir kritis diperlukan agar siswa

tidak mudah menerima informasi secara mentah, tetapi mampu menilai kebenaran dan relevansinya terhadap nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis akan lebih siap menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti konflik kepentingan, perbedaan pendapat, serta isu-isu keadilan dan hak asasi manusia.

Selain berpikir kritis, *civic skills* juga mencakup keterampilan berkomunikasi dan berargumentasi. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis dengan bahasa yang santun, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterampilan ini penting dalam praktik kehidupan demokratis, karena demokrasi menuntut adanya dialog, musyawarah, dan pertukaran gagasan. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik diharapkan mampu belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta mencapai kesepakatan secara damai.

*Civic skills* juga berkaitan erat dengan keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kewarganegaraan. Partisipasi dapat diwujudkan melalui keterlibatan peserta didik dalam diskusi kelas, kegiatan organisasi sekolah, musyawarah kelas, maupun kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Pengalaman berpartisipasi ini penting untuk melatih siswa agar terbiasa mengambil peran dalam kehidupan bersama, menghargai aturan yang disepakati, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Dalam praktik pembelajaran PPKn, pengembangan *civic skills* menuntut penggunaan model pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru cenderung kurang memberikan ruang bagi siswa untuk melatih keterampilan berpikir, berkomunikasi, dan berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif, seperti melalui diskusi kelompok, studi kasus, simulasi,

dan pemecahan masalah. Melalui aktivitas tersebut, siswa dapat mengembangkan *civic skills* secara bertahap dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan *civic skills* melalui pembelajaran PPKn menjadi kebutuhan yang mendesak. Pembelajaran yang dirancang secara aktif, kontekstual, dan berbasis masalah diharapkan mampu melatih peserta didik untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab. Pengembangan *civic skills* ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya siswa sebagai warga negara muda yang demokratis, kritis, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### 3. *Civic Disposition* (Sikap/Disposisi Kewarganegaraan)

*Civic disposition* atau sikap kewarganegaraan merupakan dimensi kompetensi kewarganegaraan yang berkaitan dengan kecenderungan sikap, nilai, dan karakter yang melekat pada diri siswa sebagai warga negara. *Civic disposition* mencerminkan bagaimana siswa memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam perilaku sehari-hari. Jika *civic knowledge* berfokus pada pemahaman konsep dan *civic skills* menekankan pada kemampuan bertindak, maka *civic disposition* menitikberatkan pada pembentukan karakter dan sikap batin yang menjadi dasar bagi tindakan tersebut.

Secara konseptual, *civic disposition* mencakup sikap-sikap seperti tanggung jawab, kejujuran, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, kepedulian sosial, semangat kebangsaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Sikap-sikap ini menjadi ciri utama warga negara yang baik (*good citizen*) dalam masyarakat demokratis. Siswa yang memiliki *civic disposition* yang baik tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki kemauan dan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela dan bertanggung jawab.

Pengembangan *civic disposition* memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan karakter. Melalui pembelajaran PPKn, siswa diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran moral, empati, serta kepedulian terhadap sesama.

Proses internalisasi nilai ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn perlu dirancang tidak hanya sebagai ruang transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks kehidupan demokratis, *civic disposition* sangat berperan dalam membentuk kesadaran demokratis siswa. Kesadaran demokratis tercermin dalam sikap menghargai pendapat orang lain, kesediaan bermusyawarah, keterbukaan terhadap kritik, serta kesiapan menerima keputusan bersama. Siswa yang memiliki *civic disposition* yang baik akan lebih mampu bersikap dewasa dalam menghadapi perbedaan, menghindari konflik yang bersifat destruktif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan hak.

Pembentukan *civic disposition* juga berkaitan erat dengan iklim pembelajaran di kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar yang demokratis, terbuka, dan menghargai partisipasi akan memberikan pengalaman nyata bagi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan. Sebaliknya, lingkungan yang otoriter dan kurang memberikan ruang dialog dapat menghambat perkembangan sikap demokratis siswa. Oleh karena itu, guru PPKn memiliki peran strategis sebagai fasilitator sekaligus teladan dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan melalui sikap dan perilaku sehari-hari.

Dalam konteks SMPN 01 Lebong, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sikap kewarganegaraan siswa, khususnya terkait keberanian mengemukakan pendapat, menghargai perbedaan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kelas, masih perlu ditingkatkan. Sebagian siswa cenderung pasif dan enggan terlibat dalam diskusi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembelajaran PPKn perlu lebih diarahkan pada penguatan *civic disposition* melalui aktivitas yang mendorong interaksi, kerja sama, dan refleksi nilai.

Dengan demikian, penguatan *civic disposition* melalui pembelajaran PPKn menjadi bagian integral dalam upaya membentuk siswa sebagai warga negara muda yang berkarakter, demokratis, dan berkepribadian Pancasila. Apabila *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* dikembangkan secara seimbang, maka pembelajaran PPKn akan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial.

Hakikat pembelajaran PPKn di SMP adalah menyiapkan siswa agar mampu memahami dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa, sekaligus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, pembelajaran PPKn harus memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, bertanya, mengemukakan pendapat, serta memecahkan masalah kewarganegaraan yang relevan dengan kehidupan mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. PPKn tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan keterampilan sebagai warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pembelajaran PPKn menjadi kebutuhan yang mendesak agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

## **2. Model Problem Based Learning (PBL)**

### **a. Pengertian Problem Based Learning (PBL)**

*Problem Based Learning* (PBL) merupakan model pembelajaran yang menempatkan masalah kontekstual dan autentik sebagai titik awal proses belajar. Masalah yang disajikan tidak bersifat hipotetis, melainkan berangkat dari situasi nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga mampu

merangsang rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Melalui PBL, siswa didorong untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan, mencari informasi yang relevan, serta menyusun solusi secara sistematis melalui kerja individu maupun kelompok (Savery, 2021).

PBL berlandaskan pada pandangan konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru kepada siswa, tetapi dibangun sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam konteks ini, peserta didik berperan sebagai subjek aktif yang mengonstruksi pemahamannya berdasarkan interaksi dengan masalah, lingkungan belajar, serta diskusi dengan teman sebaya. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan, membimbing, dan memberikan umpan balik selama proses pemecahan masalah berlangsung (Hmelo-Silver & Eberbach, 2022).

Lebih lanjut, PBL menekankan pentingnya pembelajaran kolaboratif. Siswa belajar bekerja sama dalam kelompok untuk saling bertukar gagasan, mengemukakan argumen, serta mengevaluasi berbagai alternatif solusi. Proses ini tidak hanya meningkatkan penguasaan konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

Dalam pembelajaran PPKn, PBL memiliki relevansi yang kuat karena karakteristik materi PPKn yang berkaitan erat dengan persoalan sosial, politik, hukum, dan kewarganegaraan. Isu-isu seperti pelaksanaan nilai Pancasila, praktik demokrasi di lingkungan sekolah, hak dan kewajiban warga negara, serta permasalahan kehidupan bermasyarakat dapat dijadikan sebagai masalah pembelajaran yang kontekstual. Melalui PBL, peserta didik tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis dan menyikapi

permasalahan kewarganegaraan secara rasional dan bertanggung jawab (Wahyuni & Rahmawati, 2024).

Dengan demikian, *Problem Based Learning* merupakan model pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan sikap kewarganegaraan. Penerapan PBL dalam pembelajaran PPKn di SMP diharapkan mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna, kontekstual, serta berkontribusi pada pembentukan siswa sebagai warga negara yang sadar, kritis, dan demokratis.

**b. Karakteristik *Problem Based Learning* (PBL)**

*Problem Based Learning* (PBL) merupakan model pembelajaran yang memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari pembelajaran konvensional. Karakteristik utama PBL terletak pada penggunaan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Permasalahan yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai bahan diskusi, tetapi juga menjadi sarana bagi siswa untuk membangun pengetahuan melalui proses penyelidikan dan pemecahan masalah secara sistematis. Menurut Savery (2006), masalah dalam PBL harus bersifat autentik, relevan dengan kehidupan siswa, serta mampu mendorong munculnya rasa ingin tahu dan kebutuhan belajar.

Karakteristik berikutnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*). Dalam PBL, peserta didik berperan aktif dalam mencari informasi, menganalisis permasalahan, mengajukan alternatif solusi, serta menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang membimbing jalannya proses belajar. Arends (2012) menjelaskan bahwa model PBL dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, keterampilan pemecahan

masalah, serta kemampuan belajar mandiri melalui keterlibatan langsung dalam situasi yang bermakna.

Selain berpusat pada siswa, PBL juga menekankan pentingnya pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah, bertukar ide, serta menyusun solusi bersama. Aktivitas kolaboratif tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan sikap saling menghargai pendapat. Penelitian Yulianingsih (2023) menunjukkan bahwa penerapan PBL mampu meningkatkan partisipasi aktif, kemandirian belajar, dan kemampuan bekerja sama peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Karakteristik lainnya adalah penggunaan berbagai sumber belajar. Dalam PBL, siswa tidak hanya bergantung pada buku teks, tetapi juga didorong untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang relevan, baik melalui media digital, artikel, lingkungan sekitar, maupun hasil observasi langsung. Melalui aktivitas tersebut, siswa belajar mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memilih dan mengevaluasi informasi yang diperoleh.

PBL juga memiliki tahapan refleksi sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Setelah proses pemecahan masalah selesai, siswa melakukan evaluasi terhadap proses maupun hasil belajar yang telah dicapai. Refleksi ini membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan proses berpikir mereka sehingga dapat menjadi dasar perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, PBL tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembentukan kemampuan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta pengembangan sikap belajar yang aktif dan mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama Problem Based Learning meliputi penggunaan

masalah autentik sebagai titik awal pembelajaran, pembelajaran yang berpusat pada siswa, kerja sama kelompok, pemanfaatan berbagai sumber belajar, serta adanya proses refleksi. Karakteristik tersebut menjadikan PBL relevan diterapkan dalam pembelajaran PPKn karena mampu mendorong siswa berpikir kritis, aktif berpartisipasi, dan mampu memecahkan berbagai persoalan kewarganegaraan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

c. Langkah-langkah *Problem Based Learning* (PBL)

*Problem Based Learning* (PBL) dilaksanakan melalui tahapan pembelajaran yang sistematis untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan belajar mandiri. Menurut Arends (2012), sintaks PBL terdiri atas lima tahapan utama, yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah

Tahap pertama dimulai dengan penyajian masalah yang autentik dan relevan dengan kehidupan siswa. Guru memperkenalkan suatu permasalahan yang dapat memicu rasa ingin tahu serta mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap situasi yang dihadapi. Masalah yang digunakan hendaknya bersifat kontekstual sehingga siswa dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pembelajaran PPKn, masalah dapat berupa kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, rendahnya partisipasi dalam musyawarah kelas, konflik sosial di

lingkungan masyarakat, atau berbagai isu kewarganegaraan lainnya. Pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa untuk terlibat aktif, serta membantu siswa memahami permasalahan yang akan diselesaikan.

## 2. Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar

Setelah memahami masalah yang diberikan, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih rinci dan menentukan kebutuhan belajar yang diperlukan untuk menemukan solusi. Guru membentuk kelompok belajar serta menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh setiap kelompok.

Pada tahap ini siswa mulai mendiskusikan berbagai informasi awal yang telah dimiliki, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, dan menyusun rencana penyelidikan. Kegiatan tersebut membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir analitis, komunikasi, dan kerja sama dalam kelompok.

## 3. Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok

Tahap penyelidikan merupakan inti dari model PBL. Peserta didik secara mandiri maupun berkelompok mencari berbagai informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Informasi dapat diperoleh melalui buku teks, artikel, internet, hasil observasi, maupun sumber belajar lainnya.

Dalam tahap ini guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan bantuan seperlunya tanpa mendominasi proses pembelajaran. Siswa didorong untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, membandingkan berbagai alternatif solusi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Melalui proses ini kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah siswa dapat berkembang secara optimal.

#### 4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Setelah proses penyelidikan selesai, siswa menyusun hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan, presentasi, poster, atau produk lainnya sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas untuk memperoleh tanggapan dari kelompok lain.

Kegiatan presentasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan komunikasi, mempertahankan argumen berdasarkan data, serta menghargai pendapat orang lain. Dalam pembelajaran PPKn, tahap ini sangat penting karena sejalan dengan pengembangan kompetensi demokratis dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

#### 5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

Tahap terakhir adalah melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru bersama siswa mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan, ketepatan solusi yang dihasilkan, serta hambatan yang muncul selama proses pemecahan masalah.

Melalui kegiatan refleksi, siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan proses berpikir yang telah dilakukan. Selain itu, peserta didik juga memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna karena tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang telah dilalui. Refleksi menjadi bagian penting dalam PBL karena membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar sepanjang hayat dan meningkatkan kualitas pemecahan masalah pada situasi berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, langkah-langkah *Problem Based Learning* menurut Arends terdiri atas orientasi pada masalah, pengorganisasian siswa, penyelidikan, pengembangan dan penyajian hasil karya, serta evaluasi proses pemecahan masalah. Tahapan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan secara aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Oleh karena itu, model PBL sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran PPKn untuk mengembangkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* siswa.

Tabel 2.1  
Sintaks Model *Problem Based Learning* (PBL) Menurut Arends (2012)

| Tahap PBL                                        | Aktivitas Guru                                                                                                                            | Aktivitas Peserta Didik                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah          | Menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik, dan menyajikan masalah yang autentik serta relevan dengan materi pembelajaran. | Mengamati dan memahami masalah yang disajikan serta mengidentifikasi informasi awal yang berkaitan dengan masalah.                    |
| 2. Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar | Membentuk kelompok belajar, menjelaskan tugas, serta membantu peserta didik merencanakan kegiatan pemecahan masalah.                      | Berdiskusi dalam kelompok, mengidentifikasi permasalahan, merumuskan pertanyaan, dan menyusun rencana penyelidikan.                   |
| 3. Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok | Membimbing peserta didik dalam mencari informasi, mengumpulkan data, dan melakukan investigasi tanpa mendominasi proses pembelajaran.     | Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menganalisis data, berdiskusi, dan merumuskan alternatif solusi terhadap masalah.        |
| 4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya      | Membantu peserta didik menyiapkan hasil penyelidikan dan memfasilitasi kegiatan presentasi.                                               | Menyusun laporan atau hasil diskusi, mempresentasikan solusi yang diperoleh, serta memberikan tanggapan terhadap hasil kelompok lain. |

|                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah | Membimbing refleksi dan evaluasi terhadap proses maupun hasil pembelajaran yang telah dilakukan. | Melakukan refleksi terhadap proses belajar, mengevaluasi solusi yang dihasilkan, serta menyimpulkan hasil pembelajaran. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Arends (2012)

Berdasarkan sintaks *Problem Based Learning* menurut Arends (2012), setiap tahapan pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui aktivitas mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh. Dalam pembelajaran PPKn, sintaks tersebut sangat relevan karena materi kewarganegaraan banyak berkaitan dengan permasalahan sosial yang memerlukan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan model *Problem Based Learning* dipandang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan kewarganegaraan secara rasional dan bertanggung jawab.

### 3. Media Pembelajaran *Pop Up Book*

#### a. Pengertian Media *Pop Up Book*

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai perantara penyampaian pesan dari pendidik kepada siswa. Keberadaan media pembelajaran menjadi semakin krusial ketika materi yang disampaikan bersifat abstrak, kompleks, dan menuntut pemahaman konseptual yang mendalam. Dalam konteks tersebut, media pembelajaran visual memiliki peran strategis karena mampu menghadirkan representasi konkret dari konsep-konsep yang sulit dipahami hanya melalui penjelasan verbal. Salah satu bentuk media

visual yang berkembang dan dinilai efektif dalam pembelajaran adalah media *pop up book*.

Salah satu media yang dapat mendukung pembelajaran tersebut adalah *pop up book*. Media *pop up book* merupakan buku dengan elemen visual tiga dimensi yang dapat bergerak atau muncul ketika halaman dibuka, sehingga mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif dibandingkan buku teks konvensional. Menurut Dzuanda (2021), *pop up book* memiliki karakteristik visual yang mampu merangsang rasa ingin tahu serta meningkatkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. Selain itu, media ini juga dapat membantu peserta didik memahami konsep yang bersifat abstrak melalui representasi visual yang lebih konkret.

Media *pop up book* merupakan media pembelajaran berbentuk buku yang dirancang dengan elemen tiga dimensi (3D) serta bagian-bagian mekanis yang dapat bergerak, dilipat, ditarik, atau ditegakkan ketika halaman dibuka. Karakteristik utama *pop up book* terletak pada kemampuannya menghadirkan tampilan visual yang dinamis dan interaktif, sehingga memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi yang disajikan. Berbeda dengan buku teks konvensional yang bersifat dua dimensi dan statis, *pop up book* menyajikan pengalaman visual yang lebih hidup dan menarik, sehingga mampu meningkatkan perhatian serta keterlibatan belajar siswa.

Secara pedagogis, *pop up book* dikategorikan sebagai media visual konkret yang berfungsi membantu siswa memahami konsep abstrak melalui representasi visual yang nyata. Safitri dan Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa *pop up book* mampu merangsang perhatian, imajinasi, serta keterlibatan kognitif peserta didik karena memadukan unsur visual, gerak, dan narasi dalam satu kesatuan media pembelajaran. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penyampaian materi, tetapi juga

sebagai sarana eksplorasi dan pengalaman belajar yang bersifat aktif dan menyenangkan.

Ditinjau dari perspektif teori belajar konstruktivisme, penggunaan media *pop up book* sejalan dengan pandangan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan belajar. Media *pop up book* memungkinkan peserta didik mengamati, memanipulasi, dan menafsirkan informasi visual secara mandiri maupun kolaboratif. Menurut Sari dan Prasetyo (2021), media visual interaktif seperti *pop up book* mampu meningkatkan proses konstruksi pengetahuan karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan mengaitkannya dengan pengalaman belajar sebelumnya.

Selain itu, *pop up book* juga relevan dengan prinsip pembelajaran bermakna (*meaningful learning*). Visualisasi tiga dimensi yang disajikan dalam *pop up book* membantu siswa menghubungkan konsep baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tahan lama. Penelitian oleh Wulandari dan Hidayat (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran visual interaktif berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep dan retensi belajar siswa pada mata pelajaran sosial dan kewarganegaraan di tingkat SMP.

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), media *pop up book* memiliki relevansi yang sangat tinggi karena karakter materi PPKn yang bersifat abstrak, normatif, dan nilai-sentris. Konsep-konsep seperti nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta proses pengambilan keputusan bersama sering kali sulit dipahami siswa apabila hanya disampaikan melalui metode ceramah atau teks tertulis.

Melalui media *pop up book*, konsep-konsep tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk situasi konkret yang dekat dengan kehidupan siswa.

Sebagai contoh, nilai musyawarah untuk mufakat dapat divisualisasikan melalui ilustrasi *pop up book* yang menampilkan kegiatan rapat kelas atau diskusi kelompok. Praktik demokrasi seperti pemilihan ketua kelas atau OSIS juga dapat digambarkan secara visual melalui adegan pemungutan suara dan penerimaan hasil keputusan bersama. Visualisasi semacam ini membantu peserta didik memahami bahwa nilai-nilai Pancasila dan demokrasi bukan hanya konsep teoritis, tetapi praktik nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Nugroho dan Lestari (2024) yang menyatakan bahwa media visual interaktif mampu meningkatkan pemahaman konsep kewarganegaraan serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran PPKn.

Lebih lanjut, media *pop up book* juga berkontribusi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tampilan visual yang menarik dan interaktif menciptakan suasana pembelajaran yang tidak monoton, sehingga siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Menurut Fitriani dan Maulana (2021), penggunaan media pembelajaran berbasis visual tiga dimensi mampu meningkatkan minat belajar dan partisipasi aktif siswa, khususnya pada mata pelajaran yang menuntut pemahaman nilai dan sikap seperti PPKn.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media *pop up book* dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar serta pemahaman konsep siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Wulandari (2022) menunjukkan bahwa penggunaan media *pop up book* mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran karena penyajian materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.

Penelitian lain oleh Sari dan Handayani (2023) juga menemukan bahwa media *pop up book* efektif digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep pembelajaran yang memerlukan visualisasi, serta mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas. Pembelajaran tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga lebih efektif dalam membangun pemahaman konseptual serta keterampilan berpikir kritis siswa (Dzuanda, 2021; Sari & Handayani, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media *pop up book* merupakan media pembelajaran visual interaktif yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di tingkat SMP. Karakteristiknya yang konkret, menarik, dan kontekstual menjadikan *pop up book* sebagai media yang relevan untuk membantu siswa memahami konsep kewarganegaraan secara lebih mendalam, bermakna, dan aplikatif. Oleh karena itu, penggunaan media *pop up book* layak dipertimbangkan sebagai salah satu inovasi pembelajaran PPKn yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran demokratis siswa.

#### **b. Jenis dan Kelebihan *Pop Up Book***

Media *pop up book* memiliki karakteristik yang beragam berdasarkan mekanisme gerak, struktur visual, dan tingkat kompleksitas desainnya. Keberagaman jenis *pop up book* ini memberikan fleksibilitas bagi pendidik untuk menyesuaikan media dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, serta tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Dalam pembelajaran di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), pemilihan jenis *pop up book* yang tepat menjadi penting agar media dapat digunakan secara optimal sebagai sarana pembelajaran yang bermakna.

##### **1) Jenis-Jenis Media *Pop Up Book***

Secara umum, jenis *pop up book* dapat diklasifikasikan berdasarkan teknik mekanis yang digunakan dalam pembuatannya. Salah satu jenis yang paling sederhana adalah

*pop up* sederhana (*simple pop up*), yaitu *pop up book* yang menampilkan objek tiga dimensi yang muncul secara otomatis ketika halaman dibuka. Jenis ini cocok digunakan untuk memperkenalkan konsep dasar atau gambaran umum suatu materi, karena tampilannya mudah dipahami dan tidak memerlukan interaksi mekanis yang kompleks. Dalam pembelajaran PPKn, *pop up* sederhana dapat digunakan untuk menampilkan simbol-simbol negara, lambang Pancasila, atau struktur lembaga pemerintahan secara visual.

Jenis berikutnya adalah *lift-the-flap*, yaitu *pop up book* yang memiliki bagian-bagian tertentu berupa lipatan yang dapat dibuka oleh peserta didik untuk menemukan informasi tambahan. Jenis ini mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi, karena peserta didik secara aktif membuka flap untuk memperoleh pengetahuan baru. Dalam konteks PPKn, *lift-the-flap* dapat dimanfaatkan untuk menyajikan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai Pancasila, atau peran lembaga negara secara bertahap dan sistematis.

Selain itu, terdapat *pull tab pop up book*, yaitu jenis *pop up book* yang memiliki bagian yang dapat ditarik atau digeser sehingga menghasilkan gerakan tertentu pada objek visual. Jenis ini sangat interaktif dan melibatkan aspek kinestetik peserta didik. *Pull tab pop up book* dapat digunakan untuk menggambarkan proses atau alur, misalnya proses musyawarah, pemungutan suara, atau tahapan pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan demokratis. Menurut Putra dan Wahyuni (2022), media pembelajaran yang melibatkan gerak mekanis seperti *pull tab* mampu meningkatkan keterlibatan belajar siswa secara signifikan.

Jenis *pop up book* yang lebih kompleks adalah *carousel* atau *tunnel pop up*, yaitu *pop up book* yang dapat membentuk

struktur tiga dimensi melingkar atau berlapis ketika dibuka. Jenis ini mampu menyajikan informasi secara lebih detail dan komprehensif karena menghadirkan beberapa adegan atau lapisan visual dalam satu halaman.

Dalam pembelajaran PPKn, *carousel pop up book* dapat digunakan untuk memvisualisasikan sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, atau dinamika kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Keberagaman jenis *pop up book* tersebut memungkinkan guru untuk memilih atau mengembangkan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKn. Media yang tepat tidak hanya membantu penyampaian materi, tetapi juga mendukung keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran.

## 2) Kelebihan Media *Pop Up Book*

Media *pop up book* memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya relevan sebagai media pembelajaran inovatif, khususnya dalam pembelajaran PPKn. Salah satu kelebihan utama *pop up book* adalah kemampuannya menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Tampilan visual tiga dimensi yang unik dan interaktif menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak monoton. Fitriani dan Maulana (2021) menyatakan bahwa media visual tiga dimensi mampu meningkatkan minat belajar siswa karena memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari pembelajaran konvensional.

Kelebihan berikutnya adalah kemampuan *pop up book* dalam mengkonkretkan konsep abstrak. Banyak materi PPKn bersifat normatif dan konseptual, sehingga sulit dipahami siswa jika hanya disampaikan melalui teks atau ceramah. Melalui visualisasi tiga dimensi, konsep-konsep seperti demokrasi, musyawarah, dan tanggung jawab warga negara dapat ditampilkan secara nyata dan kontekstual.

Penelitian oleh Wulandari dan Hidayat (2023) menunjukkan bahwa media visual interaktif membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dan meningkatkan daya ingat terhadap materi pembelajaran.

Selain itu, *pop up book* juga mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya melihat, tetapi juga menyentuh, membuka, dan menggerakkan bagian-bagian media. Aktivitas ini melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara simultan. Menurut Nugroho dan Lestari (2024), keterlibatan aktif siswa melalui media interaktif berkontribusi positif terhadap pengembangan keterampilan berpikir kritis dan partisipasi belajar.

Kelebihan lain dari *pop up book* adalah fleksibilitas penggunaannya dalam berbagai model pembelajaran. Media ini dapat digunakan secara individual maupun kelompok, serta dapat dikombinasikan dengan model pembelajaran aktif seperti *Problem Based Learning* (PBL). Dalam pembelajaran berbasis masalah, *pop up book* dapat berfungsi sebagai stimulus awal untuk memunculkan masalah kontekstual yang akan dianalisis oleh siswa. Penggunaan media *pop up book* sebagai pemicu masalah membantu siswa memahami konteks permasalahan secara visual sebelum melakukan diskusi dan pemecahan masalah secara lebih mendalam.

Selain itu, *pop up book* juga mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*). Media ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi materi sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan pada diferensiasi dan penguatan pengalaman belajar siswa secara holistik. Studi terbaru oleh Sari dan Rahman (2023) menunjukkan

bahwa penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan fleksibel mampu meningkatkan kemandirian belajar siswa di tingkat SMP.

Dengan berbagai kelebihan tersebut, media *pop up book* dapat dipandang sebagai media pembelajaran yang efektif dan relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn. Media ini tidak hanya membantu peserta didik memahami konsep kewarganegaraan secara lebih konkret, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang aktif, partisipatif, dan bermakna. Oleh karena itu, penggunaan media *pop up book* sangat potensial untuk mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran demokratis siswa dalam pembelajaran PPKn di SMP, termasuk di SMPN 01 Lebong.

#### **4. Keterampilan Berpikir Kritis**

##### **a. Pengertian Keterampilan Berpikir Kritis**

Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) yang menjadi tuntutan utama dalam pembelajaran abad ke-21. Berpikir kritis tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan mengingat atau memahami informasi, tetapi mencakup kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi secara logis dan sistematis sebelum mengambil keputusan atau menyusun kesimpulan. Dalam konteks pendidikan modern, keterampilan ini dipandang sebagai fondasi penting bagi peserta didik untuk mampu menghadapi kompleksitas persoalan sosial, budaya, dan politik yang terus berkembang (OECD, 2021).

Secara konseptual, berpikir kritis dipahami sebagai proses berpikir rasional dan reflektif yang diarahkan pada penentuan sikap atau tindakan yang tepat berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi ini menekankan bahwa berpikir

kritis melibatkan kesadaran intelektual dalam menilai informasi, argumen, dan bukti sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Studi-studi mutakhir menegaskan bahwa siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis cenderung lebih mampu memilah informasi, menghindari bias, serta tidak mudah terpengaruh oleh opini yang bersifat manipulatif (Sari & Nugroho, 2022).

Dalam perspektif pendidikan, keterampilan berpikir kritis juga diartikan sebagai kemampuan siswa untuk mengolah informasi secara mendalam, menguji keabsahan argumen, serta memecahkan masalah dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Facione (2020) menyebutkan bahwa berpikir kritis mencakup aktivitas intelektual seperti interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan penjelasan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh penelitian-penelitian terbaru yang menekankan bahwa berpikir kritis bukan kemampuan yang muncul secara alamiah, melainkan perlu dikembangkan secara sistematis melalui pembelajaran yang menantang dan bermakna (Hidayat & Prasetyo, 2023).

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), keterampilan berpikir kritis memiliki peran yang sangat strategis. Mata pelajaran PPKn tidak hanya bertujuan menanamkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membentuk peserta didik agar mampu bersikap kritis terhadap berbagai persoalan sosial, hukum, dan politik yang berkembang di masyarakat. Siswa diharapkan tidak menerima informasi secara pasif, melainkan mampu menilai dan menyikapi isu-isu kewarganegaraan secara rasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip demokrasi (Sutrisno & Lestari, 2021).

Berpikir kritis dalam pembelajaran PPKn juga berkaitan erat dengan upaya pembentukan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab (*smart and good citizenship*). Warga negara

yang baik tidak hanya ditandai oleh kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga oleh kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi kebijakan publik, perbedaan pendapat, serta dinamika kehidupan demokratis. Winataputra (2021) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus diarahkan pada penguatan kapasitas berpikir kritis peserta didik agar mereka mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan masalah kontekstual, diskusi terbuka, serta pemecahan masalah sosial nyata terbukti efektif dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa. Pembelajaran semacam ini memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, berargumentasi, serta merefleksikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik pembelajaran PPKn yang menuntut siswa untuk memahami realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara reflektif, argumentatif, dan bertanggung jawab (Putri et al., 2022).

**b. Indikator Keterampilan Berpikir Kritis**

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan kompleks yang tidak muncul secara instan, melainkan berkembang melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis perlu dioperasionalkan ke dalam indikator-indikator yang jelas agar dapat diukur, dikembangkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam proses pembelajaran. Indikator berpikir kritis berfungsi sebagai acuan dalam perancangan aktivitas pembelajaran, penyusunan instrumen penilaian, serta analisis perkembangan kemampuan berpikir siswa, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Secara teoretis, indikator keterampilan berpikir kritis banyak merujuk pada kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Facione melalui Delphi Report. Facione (2020) mengemukakan bahwa berpikir kritis mencakup enam keterampilan inti, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan regulasi diri. Kerangka ini kemudian banyak diadaptasi dalam konteks pendidikan formal karena bersifat komprehensif dan relevan dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21. Dalam pembelajaran PPKn, indikator-indikator tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi kewarganegaraan yang menekankan pada pemahaman nilai, analisis masalah sosial, serta pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip demokrasi dan Pancasila. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

Gambar 2.1 Tabel Indikator Keterampilan Berpikir Kritis Siswa

| No | Indikator Berpikir Kritis               | Deskripsi Kemampuan Siswa                                                                                            | Contoh Aktivitas dalam Pembelajaran PPKn                                             |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mengidentifikasi dan merumuskan masalah | Siswa mampu mengenali permasalahan yang muncul dalam suatu situasi serta merumuskan masalah secara jelas dan Terarah | Mengidentifikasi permasalahan dalam kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara |
| 2  | Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi | Siswa mampu mencari informasi dari berbagai sumber serta menilai keakuratan dan Relevansinya                         | Mengumpulkan informasi dari buku, berita, atau sumber digital terkait isu demokrasi  |

|   |                                          |                                                                                                                               |                                                                            |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Menganalisis informasi                   | Siswa mampu menguraikan informasi, menemukan hubungan sebab-akibat, serta mengaitkannya dengan konsep atau nilai yang Relevan | Menganalisis hubungan antara peristiwa sosial dengan nilai-nilai Pancasila |
| 4 | Menyusun dan mengevaluasi                | Siswa mampu menyampaikan pendapat secara logis disertai alasan yang jelas serta mampu menilai argumen orang lain              | Mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas tentang praktik demokrasi        |
| 5 | Menarik kesimpulan dan membuat Keputusan | Siswa mampu merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis serta mengambil keputusan secara rasional                        | Menyimpulkan hasil diskusi tentang penyelesaian konflik sosial             |
| 6 | Memberikan solusi terhadap masalah       | Siswa mampu merumuskan solusi yang logis, realistis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila                                  | Mengusulkan solusi terhadap masalah pelanggaran hak warga negara           |

(Facione, 2020)

Salah satu indikator utama keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kemampuan ini menunjukkan bahwa peserta didik mampu mengenali persoalan yang dihadapi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, serta merumuskannya secara jelas dan terarah. Dalam pembelajaran PPKn, kemampuan mengidentifikasi masalah sangat penting karena materi pembelajaran sering kali berkaitan dengan fenomena sosial, hukum, dan politik yang kompleks. Siswa yang memiliki kemampuan ini mampu mengidentifikasi permasalahan kewarganegaraan, seperti konflik, kepentingan, ketidakadilan sosial, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, atau praktik demokrasi yang menyimpang dari nilai Pancasila. Menurut Sari dan Wahyudi (2022), kemampuan merumuskan masalah merupakan fondasi berpikir kritis karena menentukan kualitas proses analisis dan pemecahan masalah selanjutnya.

Indikator berikutnya adalah kemampuan mengumpulkan dan mengevaluasi informasi. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari buku teks, media massa, sumber digital, maupun pengalaman nyata di lingkungan sekitar. Tidak hanya mengumpulkan, siswa juga perlu menyeleksi informasi yang relevan serta mengevaluasi keakuratan, keabsahan, dan kredibilitas sumber informasi tersebut. Kemampuan ini menjadi semakin penting di era digital yang ditandai dengan banjir informasi dan maraknya hoaks. Dalam konteks PPKn, siswa perlu memiliki kecakapan literasi informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan terkait isu-isu kebangsaan dan demokrasi. Penelitian oleh Susanto dan Rahayu (2022) menunjukkan bahwa siswa yang mampu mengevaluasi informasi secara kritis cenderung memiliki sikap kewarganegaraan yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, indikator keterampilan berpikir kritis ditunjukkan melalui kemampuan menganalisis informasi dan hubungan sebab-akibat. Siswa mampu menguraikan informasi

menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, mengidentifikasi hubungan antar konsep, serta memahami sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Dalam pembelajaran PPKn, kemampuan analisis tampak ketika peserta didik mampu mengaitkan peristiwa sosial atau kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila, norma hukum, serta prinsip demokrasi.parsial.

Indikator berpikir kritis berikutnya adalah kemampuan menyusun dan mengevaluasi argumen. Siswa yang berpikir kritis mampu mengemukakan pendapat secara logis dan sistematis, didukung oleh data, fakta, serta landasan nilai atau norma yang relevan. Selain itu, siswa juga mampu mengevaluasi argumen orang lain dengan sikap terbuka dan rasional. Dalam pembelajaran PPKn, kemampuan berargumentasi sangat penting dalam kegiatan diskusi, debat, dan musyawarah kelas karena mencerminkan praktik demokrasi secara langsung. Menurut Pratama dan Lestari (2021), kemampuan berargumentasi tidak hanya menunjukkan kecakapan berpikir kritis, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sikap saling menghargai perbedaan pendapat.

Indikator selanjutnya adalah kemampuan menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Pada tahap ini, siswa mampu menyimpulkan hasil analisis berdasarkan informasi dan argumen yang telah dikaji, serta mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Kemampuan ini mencerminkan adanya proses inferensi dan refleksi yang matang. Dalam konteks PPKn, pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan logis, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika kewarganegaraan. Hidayat dan Prasetyo (2023) menegaskan bahwa kemampuan menarik kesimpulan yang tepat merupakan indikator penting berpikir kritis karena menunjukkan integrasi antara pengetahuan, analisis, dan pertimbangan nilai.

Indikator terakhir dari keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan memberikan solusi terhadap masalah secara rasional dan etis. Siswa mampu mengusulkan alternatif solusi yang realistis, mempertimbangkan dampak sosial, serta berlandaskan

pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi. Dalam pembelajaran PPKn, solusi yang diajukan peserta didik idealnya mencerminkan sikap demokratis, keadilan sosial, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keberagaman. Menurut Kurniawan dan Fitria (2024), kemampuan merumuskan solusi yang etis menunjukkan bahwa berpikir kritis tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga terintegrasi dengan pembentukan karakter kewarganegaraan.

Dengan demikian, indikator keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran PPKn mencakup rangkaian kemampuan yang saling berkaitan, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga merumuskan solusi yang bertanggung jawab. Keterampilan berpikir kritis tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual, tetapi juga mengintegrasikan nilai, sikap, dan tanggung jawab sosial. Penguasaan indikator-indikator tersebut menjadi landasan penting dalam membentuk peserta didik SMP sebagai warga negara muda yang cerdas, kritis, demokratis, dan berkarakter, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan pembelajaran abad ke-21.

## **5. Kesadaran Demokratis**

### **a. Pengertian kesadaran Demokratis**

Kesadaran demokratis adalah sikap, pemahaman, dan kemauan seseorang untuk memahami, menghargai, serta menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Kesadaran demokratis tercermin dalam perilaku yang menghormati hak dan kewajiban setiap orang, menjunjung tinggi musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama.

Kesadaran demokratis merupakan salah satu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam pembelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kesadaran demokratis tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan tentang konsep demokrasi, tetapi juga mencakup sikap, nilai, dan perilaku peserta didik yang mencerminkan praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan juga cara hidup (*way of life*) yang menuntut partisipasi aktif, penghargaan terhadap perbedaan, serta tanggung jawab sosial warga negara.

Secara konseptual, kesadaran demokratis dapat dimaknai sebagai kemampuan individu untuk memahami, meyakini, dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, kemudian mewujudkannya dalam sikap dan tindakan nyata. Menurut Winataputra (2021), kesadaran demokratis merupakan bagian integral dari *civic disposition* yang tercermin dalam perilaku warga negara yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kesadaran demokratis tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi harus terwujud dalam dimensi afektif dan psikomotorik.

Dalam konteks pendidikan, kesadaran demokratis peserta didik berkembang melalui proses pembelajaran yang memberikan ruang bagi pengalaman demokratis secara langsung. Pembelajaran yang demokratis ditandai dengan adanya dialog dua arah, keterlibatan aktif siswa, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Menurut Suryadi dan Nurdin (2022), siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi apabila mereka terlibat secara langsung dalam praktik demokrasi di lingkungan sekolah, seperti diskusi kelas, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama.

Pembelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran demokratis karena materi yang diajarkan berkaitan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui PPKn, peserta didik diperkenalkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, seperti musyawarah untuk mufakat, penghargaan terhadap perbedaan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Mulyono (2023), kesadaran demokratis dalam PPKn harus dibangun secara berkelanjutan agar siswa tidak hanya memahami demokrasi sebagai konsep, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sosial.

Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), pengembangan kesadaran demokratis menjadi sangat penting karena siswa berada pada fase perkembangan sosial yang mulai kritis terhadap lingkungan sekitarnya. Siswa SMP mulai membentuk pandangan, sikap, dan nilai yang akan memengaruhi perilaku kewarganegaraan mereka di masa depan. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn di SMP perlu dirancang secara partisipatif dan kontekstual agar mampu menumbuhkan kesadaran demokratis sejak dini.

Dalam konteks SMPN 01 Lebong, penguatan kesadaran demokratis siswa menjadi relevan mengingat keberagaman latar belakang sosial dan budaya. Sekolah sebagai miniatur masyarakat demokratis perlu menjadi ruang belajar yang aman dan inklusif, tempat siswa dapat belajar menghargai perbedaan, menyampaikan pendapat, serta mengambil keputusan bersama secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kesadaran demokratis tidak hanya diajarkan, tetapi juga dialami secara langsung oleh siswa.

#### **b. Indikator Kesadaran Demokratis Siswa**

Kesadaran demokratis siswa dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator perilaku yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator-indikator ini penting sebagai acuan dalam merancang pembelajaran, menyusun instrumen penilaian sikap, serta mengevaluasi efektivitas pembelajaran PPKn dalam membentuk karakter demokratis.

Salah satu indikator utama kesadaran demokratis adalah sikap menghargai pendapat orang lain. Siswa yang memiliki kesadaran demokratis mampu menerima perbedaan pendapat dengan sikap terbuka dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Dalam pembelajaran PPKn, sikap ini terlihat ketika siswa mampu mendengarkan pendapat teman, tidak memotong pembicaraan, serta memberikan tanggapan secara santun. Menurut Lestari dan Handayani (2022), kemampuan menghargai pendapat orang lain merupakan fondasi utama demokrasi karena mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi dan prinsip kesetaraan.

Indikator berikutnya adalah partisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan bersama. Siswa yang memiliki kesadaran demokratis tidak bersikap pasif, tetapi terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, diskusi kelompok, maupun musyawarah kelas. Partisipasi aktif menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks pembelajaran PPKn, partisipasi aktif menjadi sarana bagi siswa untuk melatih keterampilan komunikasi, berpikir kritis, serta pengambilan keputusan secara demokratis. Penelitian oleh Pramudya et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam diskusi kelas berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran demokratis.

Indikator selanjutnya adalah sikap terbuka terhadap perbedaan dan kritik. Siswa yang demokratis mampu menerima kritik dan saran sebagai bagian dari proses belajar bersama. Sikap terbuka ini mencerminkan kematangan emosional dan kesiapan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang plural.

Dalam pembelajaran PPKn, sikap terbuka dapat dilatih melalui kegiatan debat terarah, studi kasus, dan pemecahan masalah sosial yang menuntut siswa untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Menurut Kurniasih dan Widodo (2021), keterbukaan terhadap perbedaan merupakan indikator penting kesadaran demokratis karena mencegah sikap intoleran dan eksklusif.

Indikator kesadaran demokratis berikutnya adalah ketaatan terhadap keputusan bersama. Siswa yang memiliki kesadaran demokratis mampu menerima dan melaksanakan keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah, meskipun keputusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginannya. Sikap ini mencerminkan penghargaan terhadap proses demokrasi dan komitmen terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks sekolah, ketaatan terhadap keputusan bersama dapat terlihat dalam pelaksanaan kesepakatan kelas, aturan sekolah, atau hasil musyawarah kelompok. Menurut Hapsari dan Suyanto (2024), kemampuan menaati keputusan bersama merupakan bentuk konkret tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokratis.

Selain itu, kesadaran demokratis juga tercermin dalam sikap bertanggung jawab dan adil dalam berinteraksi sosial siswa mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang serta memperlakukan orang lain secara adil tanpa diskriminasi. Dalam pembelajaran PPKn, sikap ini dapat dikembangkan melalui aktivitas kolaboratif yang menuntut kerja sama dan pembagian peran secara adil. Sikap tanggung jawab dan keadilan menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami demokrasi sebagai kebebasan, tetapi juga sebagai sistem yang menuntut kedisiplinan dan kepatuhan terhadap norma.

Dengan demikian, indikator kesadaran demokratis peserta didik mencakup berbagai aspek sikap dan perilaku yang saling berkaitan, mulai dari penghargaan terhadap pendapat, partisipasi aktif, keterbukaan, hingga tanggung jawab terhadap keputusan

bersama. Penguasaan indikator-indikator tersebut menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter peserta didik sebagai warga negara muda yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran PPKn di SMPN 01 Lebong, penguatan kesadaran demokratis melalui model pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual diharapkan mampu menciptakan iklim belajar yang demokratis sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih dewasa dan berkarakter.

### **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoretis, menunjukkan posisi penelitian, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, kajian penelitian relevan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu penerapan model *Problem Based Learning* (PBL), penggunaan media *pop up book* dalam pembelajaran, serta keterkaitan antara keterampilan berpikir kritis dan kesadaran demokratis siswa dalam pembelajaran PPKn.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model PBL memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. PBL menempatkan siswa sebagai subjek aktif pembelajaran melalui penyajian masalah kontekstual yang menuntut analisis, penalaran, dan pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wahyudi (2021) menyimpulkan bahwa penerapan PBL dalam pembelajaran PPKn di tingkat SMP mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

Hal ini disebabkan oleh karakteristik PBL yang mendorong siswa untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasi, serta merumuskan solusi secara mandiri dan kolaboratif.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Nugroho dan Lestari (2022) yang meneliti penerapan PBL pada materi demokrasi dan HAM di SMP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan model PBL memiliki kemampuan analisis dan evaluasi yang lebih baik, khususnya dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan yang bersifat aktual. Penelitian ini menegaskan bahwa PBL sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran PPKn karena selaras dengan tujuan pembelajaran yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Selain model pembelajaran, penggunaan media pembelajaran juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Media *pop up book* merupakan salah satu media visual berbasis buku yang menyajikan materi pembelajaran secara menarik melalui unsur tiga dimensi dan gerak. Penelitian oleh Putri dan Hadi (2021) menunjukkan bahwa penggunaan media *pop up book* dalam pembelajaran PPKn dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep siswa, terutama pada materi yang bersifat abstrak. Media ini membantu peserta didik memahami konsep kewarganegaraan secara lebih konkret dan kontekstual.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ramadhan, Susanti, dan Yuliana (2022) mengungkapkan bahwa media *pop up book* tidak hanya meningkatkan ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran, tetapi juga mendorong keaktifan dan partisipasi dalam pembelajaran. Siswa menjadi lebih antusias dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat karena materi disajikan secara visual dan interaktif. Temuan ini menunjukkan bahwa media *pop up book* memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, khususnya ketika dipadukan dengan model pembelajaran yang menuntut keaktifan, seperti PBL.

Sejumlah penelitian juga mengkaji hubungan antara keterampilan berpikir kritis dan kesadaran demokratis siswa. Penelitian oleh Handayani dan Prakoso (2022) menemukan adanya hubungan positif antara kemampuan berpikir kritis dengan sikap demokratis siswa dalam pembelajaran PPKn. Siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik cenderung lebih mampu menghargai perbedaan pendapat, bersikap terbuka dalam diskusi, serta mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir kritis merupakan fondasi penting dalam pembentukan kesadaran demokratis.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Hidayah dan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa pembelajaran PPKn yang menekankan pengembangan berpikir kritis berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran demokratis siswa. Siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pembelajaran, seperti musyawarah kelas dan pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, keterampilan berpikir kritis dan kesadaran demokratis memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

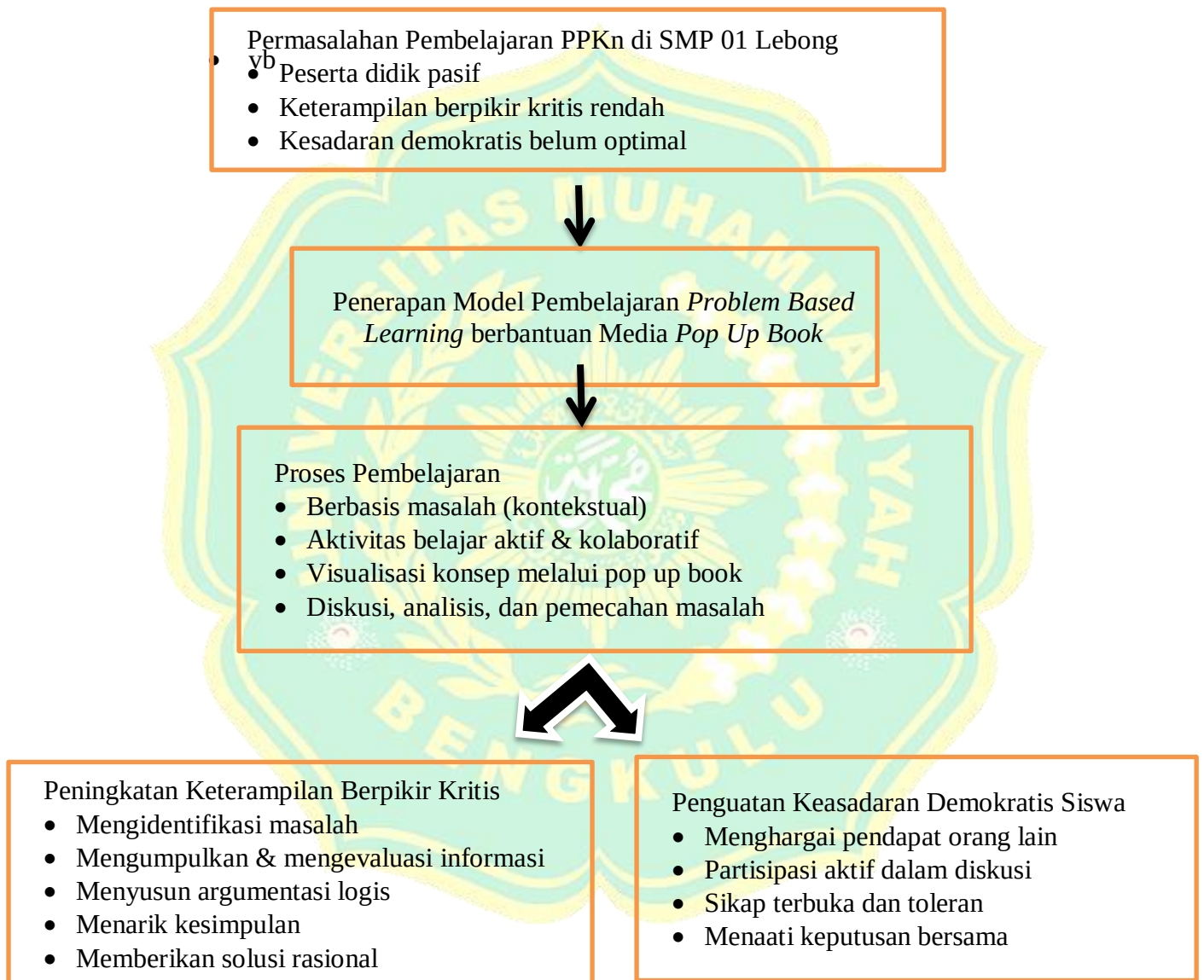
Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa model PBL efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, media *pop up book* mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa, serta keterampilan berpikir kritis memiliki keterkaitan erat dengan kesadaran demokratis. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih mengkaji masing-masing variabel secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan model PBL dengan media *pop up book* dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis sekaligus kesadaran demokratis siswa masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk melengkapi dan memperkaya kajian yang telah ada, khususnya dalam konteks pembelajaran PPKn di tingkat SMP. Penggabungan model PBL

dengan media *pop up book* diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, tetapi juga memperkuat kesadaran demokratis sebagai bekal penting dalam pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

### Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



### C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.  $H_1$  (Hipotesis Alternatif)

Terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis siswa antara kelas yang menggunakan model PBL berbantuan *Pop Up Book*, kelas yang menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL) tanpa bantuan *Pop Up Book*, dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMPN 01 Lebong.

2.  $H_1$  (Hipotesis Alternatif)

Terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan kesadaran demokratis siswa antara kelas yang menggunakan model PBL berbantuan *Pop Up Book*, kelas yang menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL) tanpa bantuan *Pop Up Book*, dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMPN 01 Lebong.